



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. ABBAS MASKUR ,
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 835273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.868.850.000

1. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 9234 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 1.385.100.000
4. Tanah Seluas 1872 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/430 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 8319 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 1.350.000.000
7. Tanah Seluas 3864 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 3200 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000
9. Tanah Seluas 3723 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 558.750.000
10. Tanah Seluas 1001 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 185.000.000



1. MOBIL, HONDA CRV TUKAR TAMBAH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX TUKAR TAMBAH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 263.496.176

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.323.346.176

III. HUTANG Rp. 61.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.262.346.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.